



## Aset Kalbar Diperiksa dengan Tujuan Khusus

**Abdul Khoir**

BorneoTribune, Pontianak

Untuk kali pertama dalam sejarah di Indonesia, Kalimantan Barat adalah provinsi yang pertama memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah aset dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota BPK RI Komisi VI, Rizal Jalil pada rapat paripurna istimewa penyampaian hasil pemeriksaan (PHP) atas manajemen aset pada Pemprov Kalbar.

"Kita telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) namun berbeda dengan pemeriksaan keuangan biasa, namun kali ini khusus masalah aset, dan satu-satunya daerah di Indonesia yang kita lakukan pemeriksaan seperti ini hanya Kalbar," kata Rizal Djalil.

Dikatakan Rizal Djalil, PDTT tersebut menilai penyajian informasi keuangan terkait pengelolaan barang milik daerah (BMD) aset tetap dan kesesuaian pengelolaan BMD atau aset tetap dengan ketentuan PP nomor 6 tahun 2006.

Selain penyajian pada sistem pada pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi. Pengendalian BPK RI juga mengungkap 26 temuan pemeriksaan ditinjau dari aspek perolehan dan aspek penggunaan dan pemanfaatan.

Dikatakan Djalil, terdapat aspek yang nilainya belum dapat diukur karena bersifat potensi penerimaan daerah diantaranya Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan pemerintah provinsi

Pertama perjanjian pemanfaatan barang milik daerah, dimana perjanjian kerjasama Pemprov kalbar dengan PT. CPM terkait tanah KONI di Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan, belum mengatur besaran kontribusi yang harus dib-

Pengkaji tidak melakukan penelitian dan penilaian atas biaya *clean and clear* tanah yang dikerjasamakan dengan PT. CPM.

Kedua beberapa mitra kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) belum dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dimana mitra kerjasama bangun serah BOT dengan PT. NSI, restoran Sari Bento dan Rumah makan AU Pemrov Kalbar belum mengenakan retribusi kekayaan daerah.

"Selain dua permasalahan tersebut, masih ada lima permasalahan yang menonjol yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov, terkait penatausahaan barang daerah yang sebenarnya merupakan masalah lama terjadi, namun penyelesaian ya berlarut-larut hingga sekarang," kata Rizal Djalil.

Permasalahan tersebut diantaranya BMD milik Pemrov Kalbar, senilai Rp. 1.95.699.800 tidak diketahui keberadaannya,

Aset tersebut meliputi peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp.1.541.854.550, Dinas Pendidikan minimal senilai Rp.409.945.250 dan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan senilai Rp.900.000 tidak diketahui keberadaannya.

Masalah kedua adalah aset yang diperoleh dari hibah atau bantuan dari pemerintah pusat saat ini tidak jelas statusnya yang nilainya mencapai Rp.3.846.864.000. ketiga Penggunaan dan Pemanfaatan aset peralatan dan mesin milik pemprov yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan nilai Rp.2.899.074.000 diantaranya mengenai permasalahan aset peralatan dan mesin mantan ketua DPRD Kalbar, Mantan Gubernur, mantan PNS termasuk rumah mantan pejabat.

Keempat, tanah milik Pemrov yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga nilainya mencapai Rp. 917.882.590.92. yang meliputi enam bidang tanah seluas 155.124 meter persegi yang tersebar di Pontianak,

dan ke lima pengamanan terhadap tanah milik pemprov belum optimal atau belum bersertifikat senilai Rp.79.901.908.389.33 dengan perincian dari 893 bidang tanah yang tercatat pada neraca per tanggal 31 Desember 2010, hanya sebanyak 290 bidang tanah yang telah bersertifikat dan diantara 290 tanah yang telah bersertifikat tersebut sebanyak 144 bidang tanah tersebut tidak bersertifikat atas nama pemprov.

"Harap kepada Gubernur Kalbar untuk menindaklanjuti "PR" sesuai rekomendasi BPK, dan bekerja lebih keras dan fokus kepada penataan dan pembenahan permasalahan," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Cornelis, usai menerima LHP Manajemen Aset PDTT tersebut merasa bangga dan akan memacu jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang semakin jelas ujung dan pangkalnya tersebut.

"Kita sudah lakukan catatan sejarah, satu-satunya dan pertama, namun dengan dukungan DPRD Kalbar kita akan sama-sama tuntaskan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan BPK," kata Cornelis ditempat yang sama.

Terkait masalah kerjasama dengan pihak ketiga, Gubernur akan mengacu kepada LHP tersebut, sehingga jika memang terjadi kesimpulan dimana kerjasama yang harus ditinjau ulang akibat belum adanya kesesuaian antara pembiayaan dengan nilai objek yang dikerjasamakan maka akan dilakukan peninjauan ulang termasuk lahan KONI.

"Ada yang ditindaklanjuti, jika terkait anggaran kita akan bicara dengan dewan, jika ada yang dipakai rakyat kita akan tanya rakyat mau diapakan diserahkan atau ganti rugi, nanti akan diteliti dan apapun hasilnya akan dibicarakan dengan dewan lagi," kata Cornelis.

Dari LHP dan apa yang akan dilakukan oleh Pemrov, Gubernur menargetkan pada akhir masa tahun anggaran 2011 ini, sudah diperoleh gambaran bagaimana langkah